

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya kemajuan suatu bangsa atau suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan kualitas hidup masyarakatnya, hal tersebut diketahui dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu wilayah tersebut. Pembangunan manusia sangatlah penting, mengingat bangsa yang maju adalah bangsa yang didalamnya mempunyai manusia-manusia yang unggul dan berkembang yang berdampak kepada kesejahteraan sosial. Indonesia berada di posisi ke-5 IPM Negara-Negara di ASEAN, di bawah Malaysia dan Thailand¹, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sebesar 74,39 pada tahun 2023.² Indeks tersebut mengukur rata-rata pencapaian dalam tiga aspek dasar pengembangan manusia, yakni: umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Sedangkan Indonesia masih terbilang cukup rendah dibandingkan Negara-Negara tetangganya. Pembangunan manusia sangatlah penting dalam hal menciptakan manusia indonesia yang berkualitas dan sebagai ukuran dalam kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan semua itu, perlu adanya suatu pemberdayaan masyarakat mulai dari tingkat paling bawah setara desa. Pemberdayaan masyarakat adalah cara efektif bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang diberdayakan dan diberi

¹Yayan GH. Mulyana, “Statistik dan Indeks ASEAN 2023”, Kementerian Luar Negeri, (Februari 2023), h.30.

² “Indeks pembangunan manusia Indonesia 2023”, <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 15 Nov. 2023, pukul 11.00 WIB

pelatihan-pelatihan akan menjadi masyarakat yang berkualitas dan mandiri, sehingga mendorong masyarakat untuk semakin berkembang dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan oleh pemerintah dan aparatnya. Pemerintah sepatutnya dapat berperan besar memberdayakan masyarakatnya, dengan menginspirasi, mengajak, dan memotivasi setiap individu supaya mampu guna menetapkan apa yang menjadi pilihan di hidupnya. Dalam konteks yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang *powerless* (kurang berdaya/lemah) dengan diberikan kekuatan melalui pemberdayaan agar masyarakat berubah menjadi *powerfull* (penuh, kekuatan). Secara konkret ialah pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan penguatan kemampuan masyarakat dari kondisi kelemahan.³ Tujuan dari pada hal tersebut adalah sebagai wujud usaha pemerintah guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang meminimalisir angka kemiskinan serta keterbelakangan di masyarakat. Masyarakat berada pada posisi yang "lemah" yang memerlukan bantuan dari pada pemerintahnya untuk membantu dalam memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri, dan pada posisi seperti itu pemerintah harus selalu berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakatnya, yang demikian adalah suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugasnya dan merupakan prinsip dari pada demokrasi.

³Lasiman Sugiri, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Publica*, Vol. 2, No. 1 (2012) Universitas Bandar Lampung (UBL), h. 57.

Bertepatan pada 14 Januari 2016, Presiden Joko Widodo menginisiasi sebuah program yang memiliki tujuan guna memperbaiki standar hidup masyarakat di tingkat desa atau sejenisnya melalui program KKBPK dan pengembangan sektor lainnya untuk mencapai keluarga kecil yang berkualitas.⁴ Program tersebut bernama Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Kampung Keluarga Berkualitas (KB) merupakan satuan wilayah setingkat Kelurahan, dusun atau setara, yang memenuhi syarat tertentu, dimana terdapat keterpaduan antara program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan segala sektor terkait yang dilaksanakan dengan sistemik dan sistematis. Tujuan dibentuknya Kampung KB secara umum adalah guna peningkatan standar hidup masyarakat pada tingkat kampung melalui program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, keluarga berencana) serta pengembangan di sektor terkait untuk mencapai keluarga kecil yang berkualitas yang maju, Berbudaya, dan Sejahtera. Konkritnya adalah untuk memperbaiki ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).⁵ Semangat dalam Membangun dan menetapkan Kampung Keluarga Berencana di berbagai daerah sudah melahirkan ratusan Kampung KB di seluruh Nusantara, Karena Di masa depan, Kampung Keluarga Berencana (KB) akan

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "*Kampung KB: Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat*", (Juni 2016), h. 2.

⁵"Kampung Keluarga Berkualitas "CEMPAKA" Kelurahan Depok Jaya", <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> di akses pada 1 Januari 2019, h. 1.

menjadi simbol dari program kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Prinsip Program KKBPK adalah menciptakan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan menjalankan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut termaktub di dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP tersebut terdapat delapan peran atau fungsi keluarga, yaitu: (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi, dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.⁶

Depok, salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat yang telah menerapkan program Kampung KB, karena dinilai selaras dengan program unggulan Kota Depok. Hal tersebut diungkapkan dalam sambutan Supian Suri, selaku Sekretaris Daerah Kota Depok, dalam rapat koordinasi Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (KB) tingkat Kota Depok tahun 2023 di aula Teratai, Gedung Balai Kota Depok, pada Kamis, 25 Mei 2023. Beliau mengharapkan agar program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) yang sedang diperkuat sekarang ini dapat berintegrasi dengan program unggulan Kota Depok, guna menunjang pembangunan menuju Kota Depok yang maju dan makmur. Supian Suri berkata “Program unggulan Kota Depok yang selaras dengan Kampung KB adalah Depok ramah keluarga atau berketahanan keluarga, disinergikan juga melalui program

⁶ Kementerian komunikasi dan informatika, “Kampung KB: Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat”, (Juni 2016), h. 3.

RW ramah anak, posyandu, posbindu, kampung cerdas ramah keluarga (caraka), serta pokja keluarga sehat.⁷ Dan salah satu daerah yang mengimplementasikan program Kampung KB di Kota Depok adalah Kelurahan Cilodong, ditetapkan sebagai kampung KB pada tanggal 1 November 2019 oleh pemerintahan Kota Depok, Kecamatan Cilodong. Program Kampung KB di Kelurahan Cilodong sudah berjalan empat tahun, yang dimana sudah menjadikan wilayah tersebut mulai terlihat maju dan aktif dibuktikan dengan berbagai kegiatan-kegiatan di masyarakatnya, baik dari sektor keagamaan, pendidikan, seni budaya, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan dalam program Kampung KB merupakan sebuah penguatan institusi keluarga dengan pembinaan mulai dari balita, remaja, hingga lansia. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan oleh pemerintah dengan program Kampung KB juga dapat dilihat pada Kota Depok yang semula memiliki Indeks Pembangunan Manusia 79.60 pada tahun 2016,⁸ saat ini menjadi salah satu Kota di Jawa Barat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 82,38 berada di posisi 3 tertinggi se-Jawa Barat 2023. Menurut Mohammad Idris selaku Wali Kota Depok, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok adalah bukti nyata dari kemajuan pembangunan di wilayah tersebut.⁹

⁷“Program Kampung KB Diharapkan Sejalan Dengan Program Unggulan Kota Depok”, <https://berita.depok.go.id/> di akses pada 25 Mei 2023, pukul 15.14 WIB.

⁸“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok 2021-2023”, <https://depokkota.bps.go.id/>, diakses pada 11 Januari 2023

⁹ Dodi Hasanuddin, “Kota Depok Targetkan IPM 2023 Capai 81,97, Mohammad Idris Sebut Bukti Kemajuan Pembangunan”, *Tribun News Depok*, (19 Agustus 2023), h. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditemukan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam program Kampung KB ?
2. Bagaimana pelaksanaan program Kampung KB dilingkungan Kelurahan Cilodong ?
3. Apa manfaat/dampak adanya program Kampung KB di lingkungan Kelurahan Cilodong ?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui program Kampung KB
2. Untuk memaparkan program-program Kampung KB di lingkungan Kelurahan Cilodong
3. Untuk mengetahui dampak program kampung keluarga berkualitas (KB) sebagai strategi pemberdayaan masyarakat di lingkungan Kelurahan Cilodong

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Riset ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta wawasan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program kampung keluarga berkualitas (KB) yang dicanangkan pada 14 Januari 2016 oleh presiden Joko Widodo, yang diharapkan dapat

meningkatkan standar hidup masyarakat khususnya lingkungan Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Riset ini dapat menjadi sumber pengetahuan secara langsung, menambah wawasan serta pengalaman dalam segi pemberdayaan di masyarakat, juga dalam berpikir ilmiah dalam menyusun dan menulis skripsi, dari hal tersebut pengetahuan dan perspektif dalam isu pengembangan masyarakat islam menjadi bertambah.

b. Bagi masyarakat

Temuan dalam riset kali ini diharapkan mampu menjadi salah satu inovasi bagi masyarakat guna mampu mengembangkan diri dan memberdayakan lingkungan sekitar melalui program- program dalam kampung keluarga berkualitas (KB), juga sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dengan harapan memberikan manfaat bagi pembaca., digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini pula diharapkan dapat menyajikan saran/masukan guna pengoptimalan program kampung keluarga berkualitas (KB), kepada BKKBN provinsi Jawa Barat sebagai pusat penyuluh kampung KB.

c. Bagi Akademisi

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan referensi dalam proses pengembangan karya ilmiah bagi setiap akademisi, termasuk di UIN

Sultan Maulana Hasanuddin Banten maupun pihak-pihak lain.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas analisis efektivitas program kampung keluarga berkualitas (kampung KB) sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka ini sangatlah penting, karena dengan adanya tinjauan pustaka peneliti dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga dapat menjaga orisinalitas dari penelitian. Tinjauan literatur atau kajian literatur yang sesuai dengan riset ini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anisa, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022, skripsi yang berjudul “*Peran Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Jagarayu Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang-Banten*”¹⁰ Berdasarkan penelitian pertama ini dimana peneliti mengaplikasikan metode penelitian kualitatif dari hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi guna memahami dan menggambarkan lewat deskriptif tentang peran Kampung Keluarga Berkualitas (KB) guna meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungan Jagarayu, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

¹⁰ Anisa, “Peran Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Di Lingkungan Jagarayu Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang-Banten” (Skripsi program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

Penelitian ini membahas tentang peran Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungan Jagarayu, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten telah dimulai sejak tahun 2017 dan terus berlanjut hingga sekarang ini. Dengan adanya Kampung KB di Jagarayu, masyarakat sekitar memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Berbagai program yang sedang berjalan atau telah dilaksanakan sangat berperan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penduduk wilayah tersebut.¹¹ Perbedaan penelitian ini terletak pada judul yang diangkat dalam penelitian yang saya lakukan lebih konkritnya membahas tentang strategi yang dilaksanakan pada program Kampung KB di Kelurahan Cilodong dalam pemberdayaan atau pembinaan kepada masyarakatnya.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizqi gilang ramadhani, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2023, Skripsi yang berjudul “*Analisis implementasi rebranding kampung keluarga berencana menjadi kampung keluarga berkualitas di Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo*”¹². Berdasarkan penelitian kedua ini dimana peneliti mengaplikasikan metode penelitian kualitatif dari hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi guna mengetahui dan menyajikan

¹¹ Anisa, “Peran Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Di Lingkungan Jagarayu Kelurahan Gelam Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang-Banten” (Skripsi program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), h. 3.

¹² Rizqi Gilang Ramadhani, “Analisis Implementasi Rebranding Kampung Keluarga Berencana Menjadi Kampung Keluarga Berkualitas Di Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo” (Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2023).

lewat deskriptif tentang analisis pelaksanaan perubahan nama dari Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Banyudono, Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini membahas tentang analisis pelaksanaan perubahan dari Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Banyudono, Kabupaten Ponorogo merupakan bagian dari program yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau desa untuk menciptakan keluarga dengan sumber daya manusia yang lebih unggul. Selain itu, Kampung Keluarga Berkualitas juga menjadi wujud tanggung jawab pemerintah dan instansi terkait dalam menyediakan fasilitas serta pembinaan bagi masyarakat guna meningkatkan mutu hidup mereka.¹³ Perbedaan penelitian ini terletak pada judul dan lokasi yang di angkat, meskipun ada sedikit kesamaan yaitu membahas tentang pengimplementasiannya di masyarakat, kendati demikian setiap peneliti yang meneliti tentang Kampung KB mesti mempunyai perbedaan baik pada program dan hasil yang didapatkannya di lapangan, karena setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Safira hayati, Program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari

¹³ Rizqi Gilang Ramadhani, "Analisis Implementasi Rebranding Kampung Keluarga Berencana Menjadi Kampung Keluarga Berkualitas Di Kelurahan Banyudono Kabupaten Ponorogo" (Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2023), h. 5.

Banjarmasin 2022, Skripsi yang berjudul “*Peranan penyuluh lapangan keluarga berencana (Plkb) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat kampung keluarga berkualitas (Kbb) Kelurahan Sungai Andai*”¹⁴, Berdasarkan penelitian ketiga ini dimana peneliti mengaplikasikan jenis penelitian lapangan dengan tujuan guna menggambarkan peran penyuluh lapangan Keluarga Berencana dalam usaha memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Kampung KB, Kelurahan Sungai Andai. Riset ini mengaplikasikan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Penelitian ini membahas tentang peran penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kelurahan Sungai Andai sangat penting. Program Kampung KB memerlukan kontribusi aktif dari PLKB untuk melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan program tersebut, seperti mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dan memberikan informasi serta edukasi terkait Program Kampung KB. BKKBN memiliki profesi khusus yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).¹⁵ Perbedaan penelitian ini terletak mulai dari judulnya yang pasti akan menemukan banyak perbedaan pada isinya, karena penelitian ini lebih membahas tentang peranan penyuluh

¹⁴ Safira Hayati, “Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (Plkb) Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Kelurahan Sungai Andai”, (Skripsi Program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022).

¹⁵ Safira Hayati, “Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (Plkb) Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Keluarga Berkualitas (Kbb) Kelurahan Sungai Andai”, (Skripsi Program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022), h. 3.

dan penelitian yang saya lakukan adalah terkait strategi dalam program Kampung KB itu sendiri.

F. Kerangka Pemikiran

1. Strategi

Istilah Strategi berasal dari bahasa Yunani *stratageia* (*stratos*= militer; dan *ag* = memimpin), yang artinya seni ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Konsep Sun Tzu, Hannibal, dan Carl Von Clausewitz dalam konteks bisnis strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi. Berdasarkan perspektif tersebut strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya.¹⁶

2. Pemerintah

Dari segi etimologis, pemerintah berakar dari kata Yunani yaitu '*Kubernan*' yang memiliki makna '*Nahkoda kapal*' Artinya, menatap ke depan.¹⁷ Pemerintah juga dapat dimaknai sebagai berikut, yakni: (1) Pemerintah berakar dari kata perintah yang memiliki arti melaksanakan pekerjaan atau menyuruh, (2) kemudian diberi imbuhan awalan "pe-" menjadi pemerintah yang memiliki makna badan atau

¹⁶ Fandy Tjiptono, "*Strategi Pemasaran*", (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h.3.

¹⁷ Fathur Rahman, "*Teori Pemerintahan*" (Malang: UB Press, 2018), h. 2.

organisasi yang mengurus, (3) selanjutnya ditambahkan akhiran “-an” menjadi pemerintahan, bermakna perbuatan, cara ataupun perihal.¹⁸ “Pemerintahan” atau “pemerintah” juga sering disebut *government* pada bahasa Inggris yang berakar dari suku kata “to govern”. Dari beberapa artian kata tersebut, pemerintah yang berasal dari kata perintah memiliki arti “keharusan” yang di tuangkan pada konteks peraturan perundang-undangan, keberadaan “wewenang” menandakan keabsahan dari perintah yang disampaikan. Tanpa wewenang tersebut, perintah dianggap tidak sah dan kehilangan kekuatan hukumnya.¹⁹ Berikut merupakan definisi pemerintahan. Menurut Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown, seperti yang dikutip oleh Muhtar Haboddin, pemerintahan ialah proses kehendak yang memiliki kemampuan untuk mengubah kebijakan. Oleh sebab itu, tugas pemerintahan ialah mengenali *problem* dan mencari solusinya.”²⁰

Pemerintahan adalah semua yang diselenggarakan oleh negara guna kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara, termasuk tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini mencakup pembagian kekuasaan antar lembaga negara dan hubungan mereka untuk kepentingan rakyat.²¹ Pemerintah ialah suatu wadah yang memiliki kekuasaan dalam mengatur kesejahteraan rakyat dan negara, salah satu tugas inti dari

¹⁸ Inu Kencana Syafiie, "*Ilmu Pemerintahan*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h. 8.

¹⁹ Rendy Adiwilaga, "*Sistem Pemerintahan Indonesia*" (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 4.

²⁰ Muhtar Abuddin, Pengantar "*Ilmu Pemerintahan*" (Malang: UB Press, 2015), h.2

²¹ Rendy Adiwilaga, "*Sistem Pemerintahan Indonesia*", ..., h. 4.

pemerintah ialah pemberdayaan masyarakat. Kehadiran suatu pemerintahan dimaksudkan untuk melayani masyarakat, pemerintah diwajibkan untuk melayani masyarakat dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Di dalam sejarah terbukti bahwa setiap masyarakat, termasuk kelompok kecil atau bahkan individu, memerlukan layanan dari pemerintah.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Makna pemberdayaan bila di lihat dari akar katanya, “daya” ialah kata dasar dan di tambahkan awalan “ber”, yang bermakna memiliki daya. Jika daya diartikan sebagai tenaga atau kekuatan, dengan demikian berdaya berarti memiliki kekuatan. Berdasarkan keterangan tersebut, oleh karenanya, pemberdayaan mampu diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan supaya objek mencapai keberdayaan atau memiliki kekuatan.²² Pemberdayaan adalah proses redistribusi kekuasaan dari kelompok yang kuat kepada yang lemah. Ini adalah upaya untuk membantu kelompok atau individu yang kurang beruntung agar bisa bersaing dan berkontribusi secara efektif. Dalam konteks ini, seluruh individu mempunyai peluang yang setara untuk berpartisipasi dalam suatu kompetisi di mana seluruh pihak memiliki kesempatan untuk berhasil.²³ Sumodiningrat, mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat harus melalui tiga arah, yakni: (1) menciptakan kondisi yang mendukung untuk perkembangan potensi masyarakat (menciptakan iklim yang memungkinkan potensi

²² Dedeh Maryani Ruth Roselin E.Naingolan, "*Pemberdayaan Masyarakat*", (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 1.

²³ Jim Ife, "*Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 142.

berkembang); (2) memperkuat kemampuan dan kekuatan yang dimiliki masyarakat (menguatkan potensi dan daya yang dimiliki); (3) memberikan perlindungan kepada masyarakat (memberikan perlindungan).²⁴ Sumodiningrat juga berpendapat tentang tujuan pemberdayaan masyarakat adalah: (1) meningkatkan pendapatan masyarakat di level bawah dan mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, (2) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan kegiatan sosial ekonomi yang produktif di pedesaan, dan (3) memperkuat kemampuan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik di kalangan aparat maupun warga.²⁵ Adapun *empowerment* atau pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai hasil dari evolusi pemikiran dalam masyarakat serta kebudayaan barat, khususnya wilayah Eropa. Pemberdayaan atau *Empowerment* pada intinya, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat agar mereka mampu mengatasi tantangan atau masalah yang dihadapinya sendiri.

Sementara itu, menurut perspektif Islam yang termaktub dalam Al- Qur'an terkait pemberdayaan, Islam mendorong pemberdayaan masyarakat dengan prinsip-prinsip ukhuwah, ta'awun, dan persamaan derajat sebagai landasan utamanya.²⁶ Pertama adalah *ukhuwah* menurut bahasa Arab

²⁴ Dwi Pratiwi Kurniawati, "*Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*", vol. 1, No. 4, (Malang, Brawijaya University, 2013), h. 10

²⁵ Lasiman Sugiri, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat", Vol. 2, No. 1 *jurnal Publica* (2012) Universitas Bandar Lampung (UBL), h. 58.

²⁶ Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam

bermakna persaudaraan, dan kedua prinsip *ta'awun*, yaitu Allah memerintahkan manusia guna saling membantu antar sesama, Ketiga ialah prinsip kesetaraan/persamaan derajat antar umat manusia.

Dalam Islam pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi.²⁷ Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin hidup dalam kondisi sejahtera. Tindakan apa pun yang bertentangan dengan aspek kesejahteraan sangat tidak sejalan dengan ajaran Islam.²⁸ Islam adalah agama yang menginginkan umatnya hidup dalam kesejahteraan, karena ia adalah awal dari lahirnya kemashlahatan

Menurut al-Ghazali kegiatan ekonomi telah menjadi bagian dari kegiatan sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jika kondisi itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Di sisi lain al-Ghazali menegaskan tiga alasan seseorang melakukan aktivitas ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan kesejahteraan bagi diri dan keluarga dan membantu orang lain yang sedang membutuhkan.²⁹ Dalam konteks pemberdayaan masyarakat unsur ketiga mutlak

Perspektif Al Qur'an", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39, No. 1, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, 2019), h. 34.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 102.

²⁸ Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, *A'lam al-Muwaqi'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), Juz. 3, h. 11.

²⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa Min al-Ilmi al-Ushul* (Madinah: Universitas Islam madinah, 1991), Vol. 2, h. 482.

dibutuhkan, karena pemberdayaan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa ada kesediaan dan keinginan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kesejahteraan merupakan isu utama dalam ekonomi suatu negara, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya. Prinsip ini diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan pengetahuan bangsa, dan berperan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Termuat tiga bentuk pembangunan yang dilewati bangsa kita ini dalam upayanya mensejahterakan masyarakat.³⁰ Pertama ada model pembangunan nasional yang fokus pada pertumbuhan ekonomi, model pembangunan yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, dan model pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan manusia (*people centered*).³¹ Tidak mengherankan setiap kali terjadi pergantian pemimpin, isu utama yang menarik perhatian atau menjadi fokus promosi adalah pembangunan dan kesejahteraan yang merata, apapun profesi dan kedudukannya. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat sangatlah mutlak dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta para aparatnya, pemerintah daerah mesti dapat

³⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, "*Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*", (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 43.

³¹ Aziz Muslim, "Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Aplikasi* Vol. 8, No. 2, (Juni-Februari 2018), UIN Sunan kalijaga Yogyakarta h. 89.

berkontribusi besar memberdayakan masyarakatnya, dengan menginspirasi, mengajak, dan memotivasi setiap masyarakat supaya mampu guna menetapkan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Pemberdayaan bukanlah memberikan sesuatu, tetapi merupakan proses pembelajaran untuk mengembangkan pola pikir individu..³² Dalam situasi luas lainnya, pemberdayaan masyarakat ialah proses memberikan kekuatan kepada masyarakat yang awalnya kurang berdaya, sehingga mereka menjadi lebih berdaya. Secara konkritnya adalah, pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan peningkatan kekuatan dari kelemahan rakyat).³³ Pemberdayaan masyarakat adalah cara efektif bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Masyarakat yang diberdayakan dan diberi pelatihan-pelatihan akan menjadi masyarakat yang mandiri, sehingga mendorong masyarakat untuk semakin berkembang dan dapat mengatasi masalah-masalah dalam kependudukan.

G. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Ketika melaksanakan penelitian, penulis harus mengikuti suatu pedoman atau ketentuan yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dipastikan valid dan sesuai. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif

³² Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam", *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2016) Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, h. 193.

³³ Lasiman Sugiri, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *jurnal Publica*, Vol. 2, No. 1 (2012) Universitas Bandar Lampung (UBL), h. 57.

disebabkan karena adanya perubahan cara pandang terhadap realitas, fenomena, atau gejala. Dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, dan bermakna penuh. Ini disebut sebagai paradigma postpositivisme.³⁴

Metode penelitian kualitatif berdasarkan filsafat postpositivisme, diaplikasikan untuk mengkaji kondisi alam objek, berbeda dengan eksperimen. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengambilan sampel data dilaksanakan secara *purposive* dan *snowball*, pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan temuan hasil penelitian lebih memfokuskan pada makna ketimbang generalisasi, kita mesti mengikuti suatu ketentuan atau pedoman yang berlaku, supaya temuan penelitian yang diperoleh dapat dipastikan valid dan sesuai.³⁵

Dalam metode penelitian yang digunakan ini, peneliti menerapkan pendekatan deskriptif dalam jenis penelitian kualitatif yakni suatu upaya atau metode yang mendeskripsikan analisis efektivitas program kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) sebagai strategi pemberdayaan masyarakat, lingkungan Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kampung keluarga

³⁴ Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kuantitatif”, (Makassar:Syakir Media Press, 1 Desember 2021), h. 25.

³⁵ Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kuantitatif”, (Makassar:Syakir Media Press, 1 Desember 2021), h. 25.

berkualitas (KB) dalam efektivitasnya yang merupakan strategi pemberdayaan masyarakat, khususnya di lingkungan Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian beralamat di lingkungan Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.

4. Teknik pengumpulan data

Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya pencatatan terhadap keadaan atau perilaku suatu objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena tersebut.³⁶ Observasi mempunyai manfaat yang bisa mendapatkan pengalaman mendalam, dimana peneliti dapat berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Adapun yang diamati peneliti adalah bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kelurahan Cilodong Kota Depok, untuk menggali informasi tersebut, peneliti secara langsung melakukan pengamatan

³⁶ Yusuf Abdul Aziz, "Metode observasi: pengertian, macam dan contoh", *Deepublish Store*, (20 September 2022). h. 3.

terhadap subjek yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan upaya pengambilan data secara langsung dengan bertatap muka yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih. Teknik wawancara sebagai cara sistematis guna memperoleh informasi berbentuk pernyataan lisan tentang suatu objek atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, saat ini, dan akan datang.³⁷ Wawancara adalah sesi pertanyaan dan jawaban di mana pewawancara dan narasumber bertukar informasi serta sudut pandang mereka. Aturan dalam wawancara sebenarnya tidak hanya dapat dipelajari dari buku atau dari para pakar saja, karena pelaksanaannya sangat tergantung pada kondisi, keadaan, atau situasi yang sedang terjadi. Ada yang berpendapat bahwa seseorang yang ramah mungkin dapat menjalankan wawancara tanpa melalui latihan formal. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa pengalaman dapat meningkatkan kualitas wawancara oleh peneliti secara signifikan.

Selama wawancara, alat perekam seperti tape recorder digunakan untuk merekam informasi jawaban yang diberikan oleh subjek. Teknik ini penting untuk memastikan rekaman jawaban yang akurat. Pewawancara harus mengambil catatan setiap jawaban dari subjek dan menghindari pertanyaan yang mengarah atau terlalu

³⁷ Ida Bagus Gede Puja Astawa, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi", (Penulis Dosen Program Studi Antropologi Fakultas Sastra Dan Budaya Universitas Udayana Bali, 2016), h. 4.

spesifik, yang dapat memengaruhi jawaban subjek dan menyimpang dari tujuan penelitian. Jawaban dari subjek bisa ditulis atau direkam satu per satu untuk keperluan dokumentasi dan analisis lebih lanjut.³⁸

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung pengurus Kampung KB serta pihak-pihak yang terlibat pada program Kampung KB Kelurahan Cilodong. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan intensif, dengan fokus pada topik yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman yang telah disusun. Selama penelitian ini dilakukan peneliti telah banyak mewawancarai orang-orang yang terlibat dengan pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Cilodong yang berjumlah 12 orang, di antaranya sebagai berikut :

1. Herry Wibowo, Lurah Kelurahan Cilodong
2. Hani Rosiana, Sekretaris Lurah Kelurahan Cilodong
3. Enok Suningsih, Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan Kelurahan Cilodong
4. Sutardi Surapradja, Ketua Kampung KB Kelurahan Cilodong
5. Ari Susanto, Sekretaris Kampung KB Kelurahan Cilodong
6. Edi Mulatsih, Seksi Reproduksi Kampung KB Kelurahan Cilodong,
7. Ihat Solihat, Seksi Cinta Kasih Kampung KB

³⁸ Ahmad Sangid dan Ali Muhti, *Budaya Literasi Pesantren*, (Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2020), h. 16.

Kelurahan Cilodong

8. Jaka Setiawan, Ketua RW 02 Kelurahan Cilodong
9. Maulani, Ketua RT 05 RW 08 Kelurahan Cilodong
10. Yuningsih, Ketua RT 05 RW 05 Kelurahan
11. Rohmat, Masyarakat penerima manfaat Kampung KB
Kelurahan Cilodong
12. Sopi, Masyarakat penerima manfaat Kampung KB
Kelurahan Cilodong

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik atau upaya pemungutan data untuk memperkuat data yang dikumpulkan oleh si penulis. Dokumentasi merujuk pada kegiatan dan sistem yang menghasilkan informasi tertulis atau rekaman. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup data tentang pelaksanaan program Kampung KB dan berbagai informasi terkait lainnya.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian peneliti melakukan teknik analisis data, yaitu suatu cara atau metode dalam mengolah atau memproses data menjadi sebuah hasil atau pendeskripsian informasi yang valid dan juga dapat dengan mudah dipahami untuk umum. Dikarenakan sifat data yang beragam, metode analisis data yang diterapkan yakni metode analisis data kualitatif, dengan cara menghimpun data-data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan dengan sesuatu yang diteliti. Kemudian untuk mendapatkan hasil akhirnya kita cari kesimpulan di antara data-data yang telah dikumpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, agar pembahasannya terfokus pada pokok permasalahan dan tidak menyimpang ke masalah lain, penulis membuat sistematika penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II, menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Lingkungan Kelurahan Cilodong Kota Depok, peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program kependudukan, dan sejarah Kampung KB.

BAB III, mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KB dan pelaksanaannya di lingkungan Kelurahan Cilodong

BAB IV, dampak dan manfaat adanya program Kampung KB serta faktor pendukung dan penghambat pengimplementasian program Kampung KB di lingkungan Kelurahan Cilodong

BAB V penutup, memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, serta kata penutup sebagai penyelesaian dari pembahasan.